



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
14. Alokasi Dana Desa Merata selanjutnya disebut ADDM, adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara merata dengan nominal yang sama.
15. Alokasi Dana Desa Siltap selanjutnya disebut ADD Siltap, adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara proporsional berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP, adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara proporsional berdasarkan rasio dan bobot dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

17. Alokasi Dana Desa Siltap Maksimal selanjutnya disebut ADD Siltap Maksimal, adalah bagian dari ADD Siltap yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran siltap aparatur pemerintah desa.
18. Alokasi Dana Desa Sisa Siltap di setiap desa adalah bagian dari ADD siltap setelah dikurangi ADD Siltap Maksimal yang dapat dimanfaatkan untuk tunjangan aparatur pemerintah atau kegiatan pembangunan lainnya sesuai hasil musyawarah desa.
19. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran.
21. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Penghasilan Tetap selanjutnya yang disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan perangkat desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pedoman Pengelolaan ADD meliputi kegiatan penganggaran, pengalokasian, pembagian, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Tata cara penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (DPA-BPKPAD) Kabupaten Demak.
- (3) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

- (1) ADD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebesar Rp97.750.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa Merata (ADDM), Rp19.550.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atau 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten, dibagi secara merata untuk setiap desa;
 - b. Alokasi Dana Desa Siltap (ADD Siltap) sebesar Rp 58.650.000.000,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau 60 % (enam puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa; dan

- c. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Rp19.550.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atau 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional untuk setiap desa, berdasarkan kondisi desa.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa (ADD_x) dihitung menggunakan rumus :

$$ADD_x = ADDM_{Desa} + ADD\ Siltap_{Desa} + ADDP_{Desa}$$

- (2) Alokasi Dana Desa Merata (ADDM_{Desa}) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.452.675,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk setiap desa.
- (3) Alokasi Dana Desa Siltap (ADD Siltap_{Desa}) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADD\ Siltap_{Desa} =$$

$$\frac{\{ \sum Kades + (0,75 \times \sum Sekdes) + (0,55 \times \sum Perangkat\ Desa) \}}{ADD\ Siltap_{Kab} \times \text{-----}}$$

$$\{ (\sum Kades-Kab) + (0,75 \times \sum Sekdes-Kab) + (0,55 \times \sum Perangkat\ Desa-Kab) \}$$

- (4) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP_{Desa}) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:
- 10 % (sepuluh perseratus) untuk rasio jumlah penduduk (Z1);
 - 50 % (lima puluh perseratus) untuk rasio jumlah rumah tangga miskin (Z2);
 - 15 % (lima belas perseratus) untuk rasio luas wilayah (Z3); dan
 - 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk rasio indeks kesulitan geografis (Z4).

- (5) Besaran ADDP_{Desa} setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDP_{Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times ADDP_{Kab\ Demak}$$

- (6) Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa (ADD_x) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 7

- (1) ADD dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (2) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 8

Penggunaan ADD bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, antara lain;
 1. alat tulis kantor;
 2. benda pos;
 3. makanan dan minuman rapat/ tamu dinas ;
 4. cetak/penggandaan;
 5. pakaian dinas dan atributnya;
 6. perjalanan dinas;
 7. upah kerja;
 8. honorarium narasumber/ahli;
 9. honorarium tenaga operator desa;
 10. jaminan kesehatan, ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 11. tunjangan BPD;
 12. operasional BPD bagi desa yang tidak mempunyai Pendapatan Asli Daerah; dan
 13. operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, antara lain:
 1. data pengangguran di Desa;
 2. data anak putus sekolah di Desa;
 3. data masyarakat miskin dan orang terlantar di Desa;
 4. data Rumah tidak layak huni di Desa;
 5. data Posyandu (stunting, kematian balita, ibu hamil, ibu melahirkan, dan lain-lain);
 6. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa; dan
 7. lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.

- d. bidang tata pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, antara lain;
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musyawarah dusun, rembug warga, dan lain-lain);
 3. penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 4. pengembangan sistim informasi Desa;
 5. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa; dan
 6. lain-lain sub bidang tata pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- e. bidang pertanahan, antara lain:
 1. sertifikasi tanah kas Desa;
 2. administrasi pertanahan;
 3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 4. penetapan dan penegasan batas Desa;
 5. penyusunan tataruang desa dan peta Desa; dan
 6. lain lain sub bidang pertanahan.
- f. pengembangan kegiatan inovasi Desa bidang pemerintahan.

Pasal 9

Penggunaan ADD bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi:

- a. bidang pendidikan, antara lain;
 1. penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, milik desa;
 2. operasional Madrasah Diniyah yang ada di desa dan terdaftar di Kementerian Agama;
 3. pemberian beasiswa pendidikan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin, masyarakat miskin dan atau berprestasi untuk semua jenjang pendidikan;
 4. perpustakaan desa; dan
 5. lain-lain sub bidang pendidikan.
- b. bidang kesehatan, antara lain:
 1. penyelenggaraan pos kesehatan desa (Polindes) milik Desa;
 2. penyelenggaran pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 3. kegiatan yang mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), meliputi:
 - a) bina keluarga balita (BKB);
 - b) bina keluarga remaja (BKR);
 - c) bina keluarga lansia (BKL);
 - d) usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
 - e) penggerakan akseptor baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - f) pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dn Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa; dan
 - g) pencanangan dan pembinaan kampung KB.

4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
 5. Lain-lain sub bidang kesehatan.
- c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang kawasan permukiman, antara lain:
 1. pembangunan/rehab RTLH warga miskin sesuai data Basis Data Terpadu (BDT);
 2. pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana air bersih;
 3. pengadaan/ pemeliharaan jamban sehat;
 4. pengelolaan sampah terpadu;
 5. taman bermain anak;
 6. penerangan jalan; dan
 7. lain-lain sub bidang kawasan pemukiman.
 - e. bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika, Sistem Informasi Desa (SID);
 - g. energi dan sumber daya mineral, meliputi;
 1. sarana dan prasarana energi alternatif;
 2. pembangunan sarana dan prasarana teknologi tepat guna; dan
 3. lain lain sub bidang energi dan sumber daya mineral.
 - h. bidang pariwisata, antara lain;
 1. pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa; dan
 2. lain lain sub bidang pariwisata milik desa.
 - i. pengembangan kegiatan Inovasi Desa bidang pembangunan.

Pasal 10

Penggunaan ADD bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan kegamaan, yang bersifat edukatif dan/atau produktif;
- c. pramuka, kepemudaan dan olah raga;
- d. kelembagaan masyarakat di desa;
 1. operasional PKK, LKMD, Karang Taruna, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 2. pelatihan/ pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 3. pembentukan dan dukungan fasilitasi KPMD; dan
 4. lain lain sub bidang kelembagaan masyarakat.
- e. pengembangan kegiatan Inovasi Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pasal 11

Penggunaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. bidang kelautan dan perikanan;
- b. bidang pertanian dan peternakan;

- c. peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - 1. Pemberian biaya pendidikan bagi perangkat desa untuk masuk perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Demak;
 - 2. peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa; dan
 - 3. peningkatan kapasitas BPD.
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal, antara lain;
 - 1. pembentukan BUM Desa;
 - 2. pelatihan pengelolaan BUM Desa;
 - 3. pembangunan kantor BUM Desa (menjadi aset desa);
 - 4. pelaksanaan audit keuangan BUM Desa; dan
 - 5. lain lain sub bidang dukungan penanaman modal.
- g. bidang perdagangan dan perindustrian, antara lain;
 - 1. pembangunan/pemeliharaan pasar Desa;
 - 2. pengembangan industri kecil level Desa;
 - 3. pelatihan kelompok ekonomi produktif;
 - 4. pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan; dan
 - 5. sosialisasi teknologi tepat guna (TTG) / posyantekdes/ posyantek antar desa.
- h. pengembangan kegiatan Inovasi Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- i. lain-lain bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 12

Penggunaan ADD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa dibagi dalam 3 (tiga) sub bidang, meliputi:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Pasal 13

- (1) Belanja untuk kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

- (3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian anggaran belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) didasarkan pada hasil musyawarah desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dituangkan dalam ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.

BAB V

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 15

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penghitungan Siltap didasarkan pada ADD Siltap Maksimal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - d. ADD Sisa Siltap dapat dipergunakan untuk penerimaan lain yang sah dan tunjangan lainnya, sesuai peraturan yang berlaku atau kegiatan pembangunan lainnya sesuai hasil masyawarah Desa.
- (5) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dari rekening kas desa dan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan Siltap adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki keputusan pengangkatan yang sah dari Pejabat yang berwenang; dan
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Siltap mulai diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (3) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan BPD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD antara Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Siltap Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua BPD antara Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan paling banyak 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD;

- c. Sekretaris BPD antara Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan paling banyak 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari tunjangan Wakil Ketua BPD;
 - d. Anggota BPD antara Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tunjangan Sekretaris BPD.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per bulan dan ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kondisi keuangan dan prioritas kegiatan yang ada di Desa.

BAB VI TATA CARA DAN TAHAP PENYALURAN ADD Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus).dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan pencairan.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
 - a. laporan semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD;
 - b. laporan semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana setiap tahapan pencairan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak berdasarkan laporan dari desa di wilayahnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dibentuk Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengawas Desa.

Pasal 22

- (1) Tim Pembina Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta supervisi.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah;
 - c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - e. Dinas / instansi terkait.

- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari:
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggungjawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota; dan
 - e. Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Pengawas Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari BPD dan tokoh masyarakat.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Tim Pembinaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD.

Pasal 25

Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ADD bersama masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Bagi Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran ADD tahap I tahun anggaran 2019 sebesar SiLPA ADD.
- (4) Dalam hal pada tahun anggaran 2018 masih terdapat SiLPA ADD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan ADD Tahun Anggaran 2019 sebesar SiLPA ADD Tahun Anggaran 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.01	Mranggen		5.067.279.726	1.400.531.826	1.528.600.823	7.996.412.375	7.996.400.000
33.21.01.2001		1 Banyumeneng	316.077.844	106.947.398	80.452.675	503.477.917	503.477.000
33.21.01.2002		2 Kabonbatur	316.077.844	102.172.367	80.452.675	498.702.887	498.702.000
33.21.01.2003		3 Sumberrejo	297.681.779	105.572.080	80.452.675	483.706.534	483.706.000
33.21.01.2004		4 Kalitengah	224.097.519	60.248.710	80.452.675	364.798.904	364.798.000
33.21.01.2005		5 Kangkung	242.493.584	100.915.572	80.452.675	423.861.832	423.861.000
33.21.01.2006		6 Mranggen	187.305.389	69.051.537	80.452.675	336.809.601	336.809.000
33.21.01.2007		7 Batusari	371.266.039	124.978.211	80.452.675	576.696.926	576.696.000
33.21.01.2008		8 Bandungrejo	242.493.584	43.059.065	80.452.675	366.005.325	366.005.000
33.21.01.2009		9 Brumbung	168.909.324	50.471.978	80.452.675	299.833.977	299.833.000
33.21.01.2010		10 Kembangarum	316.077.844	69.552.618	80.452.675	466.083.137	466.083.000
33.21.01.2011		11 Karangsono	316.077.844	73.054.346	80.452.675	469.584.866	469.584.000
33.21.01.2012		12 Tamansari	224.097.519	52.970.806	80.452.675	357.521.000	357.520.000
33.21.01.2013		13 Ngemplak	224.097.519	36.594.477	80.452.675	341.144.671	341.144.000
33.21.01.2014		14 Menur	279.285.714	60.184.629	80.452.675	419.923.018	419.923.000
33.21.01.2015		15 Jamus	334.473.909	63.652.583	80.452.675	478.579.167	478.579.000
33.21.01.2016		16 Wringinjajar	260.889.649	77.117.486	80.452.675	418.459.810	418.459.000
33.21.01.2017		17 Waru	224.097.519	52.203.317	80.452.675	356.753.511	356.753.000
33.21.01.2018		18 Tegalarum	260.889.649	71.333.315	80.452.675	412.675.639	412.675.000
33.21.01.2019		19 Candisari	260.889.649	80.451.330	80.452.675	421.793.654	421.793.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.02	Karangawen		3.976.894.782	1.599.347.887	965.432.099	6.541.674.768	6.541.667.000
33.21.02.2001		1 Jragung	426.454.234	197.124.001	80.452.675	704.030.910	704.030.000
33.21.02.2002		2 Wonosekar	352.869.974	214.910.566	80.452.675	648.233.216	648.233.000
33.21.02.2003		3 Margohayu	260.889.649	133.132.663	80.452.675	474.474.987	474.474.000
33.21.02.2004		4 Teluk	242.493.584	78.092.461	80.452.675	401.038.721	401.038.000
33.21.02.2005		5 Tlogorejo	260.889.649	120.419.540	80.452.675	461.761.865	461.761.000
33.21.02.2006		6 Rejosari	426.454.234	206.706.163	80.452.675	713.613.072	713.613.000
33.21.02.2007		7 Karangawen	352.869.974	104.834.105	80.452.675	538.156.755	538.156.000
33.21.02.2008		8 Kuripan	316.077.844	88.794.350	80.452.675	485.324.869	485.324.000
33.21.02.2009		9 Bumirejo	297.681.779	105.593.230	80.452.675	483.727.685	483.727.000
33.21.02.2010		10 Brambang	352.869.974	141.650.035	80.452.675	574.972.684	574.972.000
33.21.02.2011		11 Sidorejo	371.266.039	119.893.061	80.452.675	571.611.775	571.611.000
33.21.02.2012		12 Pundenarum	316.077.844	88.197.711	80.452.675	484.728.230	484.728.000
33.21.03	Guntur		4.573.930.710	1.661.839.204	1.609.053.498	7.844.823.412	7.844.815.000
33.21.03.2001		1 Blerong	297.681.779	98.771.674	80.452.675	476.906.129	476.906.000
33.21.03.2002		2 Banjarejo	205.701.454	63.178.394	80.452.675	349.332.523	349.332.000
33.21.03.2003		3 Wonorejo	205.701.454	79.371.822	80.452.675	365.525.952	365.525.000
33.21.03.2004		4 Sarirejo	187.305.389	64.158.795	80.452.675	331.916.859	331.916.000
33.21.03.2005		5 Pamongan	205.701.454	53.144.089	80.452.675	339.298.218	339.298.000
33.21.03.2006		6 Tlogoweru	224.097.519	56.849.911	80.452.675	361.400.105	361.400.000
33.21.03.2007		7 Bogosari	316.077.844	113.194.504	80.452.675	509.725.023	509.725.000
33.21.03.2008		8 Sukorejo	168.909.324	65.782.294	80.452.675	315.144.293	315.144.000
33.21.03.2009		9 Sidokumpul	205.701.454	69.975.907	80.452.675	356.130.036	356.130.000
33.21.03.2010		10 Gaji	187.305.389	58.903.383	80.452.675	326.661.448	326.661.000
33.21.03.2011		11 Krandon	168.909.324	60.407.952	80.452.675	309.769.951	309.769.000
33.21.03.2012		12 Tangkis	187.305.389	61.889.421	80.452.675	329.647.485	329.647.000
33.21.03.2013		13 Temuroso	316.077.844	184.659.761	80.452.675	581.190.280	581.190.000
33.21.03.2014		14 Bakalrejo	279.285.714	125.746.862	80.452.675	485.485.251	485.485.000
33.21.03.2015		15 Guntur	279.285.714	86.487.371	80.452.675	446.225.760	446.225.000
33.21.03.2016		16 Bumiharjo	260.889.649	77.448.807	80.452.675	418.791.131	418.791.000
33.21.03.2017		17 Tlogorejo	205.701.454	74.903.833	80.452.675	361.057.962	361.057.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.03.2018		18 Trimulyo	242.493.584	101.495.742	80.452.675	424.442.001	424.442.000
33.21.03.2019		19 Sidoharjo	224.097.519	87.358.382	80.452.675	391.908.577	391.908.000
33.21.03.2020		20 Turitempel	205.701.454	78.110.300	80.452.675	364.264.429	364.264.000
33.21.04	Sayung		5.788.071.001	1.498.748.992	1.609.053.498	8.895.873.490	8.895.865.000
33.21.04.2001		1 Bulusari	297.681.779	58.603.813	80.452.675	436.738.267	436.738.000
33.21.04.2002		2 Dombo	187.305.389	47.835.307	80.452.675	315.593.371	315.593.000
33.21.04.2003		3 Jetaksari	224.097.519	67.492.317	80.452.675	372.042.511	372.042.000
33.21.04.2004		4 Kalisari	334.473.909	99.991.646	80.452.675	514.918.230	514.918.000
33.21.04.2005		5 Karangasem	187.305.389	46.997.530	80.452.675	314.755.594	314.755.000
33.21.04.2006		6 Prampelan	260.889.649	62.075.734	80.452.675	403.418.058	403.418.000
33.21.04.2007		7 Pilangsari	224.097.519	57.059.082	80.452.675	361.609.276	361.609.000
33.21.04.2008		8 Tambakroto	242.493.584	46.515.993	80.452.675	369.462.252	369.462.000
33.21.04.2009		9 Loireng	316.077.844	52.178.562	80.452.675	448.709.082	448.709.000
33.21.04.2010		10 Sayung	352.869.974	87.820.156	80.452.675	521.142.805	521.142.000
33.21.04.2011		11 Sriwulan	260.889.649	59.950.032	80.452.675	401.292.356	401.292.000
33.21.04.2012		12 Bedono	389.662.104	76.962.157	80.452.675	547.076.937	547.076.000
33.21.04.2013		13 Purwosari	297.681.779	58.190.784	80.452.675	436.325.238	436.325.000
33.21.04.2014		14 Sidogemah	316.077.844	94.747.888	80.452.675	491.278.407	491.278.000
33.21.04.2015		15 Gemulak	352.869.974	77.465.767	80.452.675	510.788.416	510.788.000
33.21.04.2016		16 Timbulsloko	260.889.649	109.671.614	80.452.675	451.013.938	451.013.000
33.21.04.2017		17 Surodadi	205.701.454	62.285.156	80.452.675	348.439.285	348.439.000
33.21.04.2018		18 Tugu	334.473.909	101.952.385	80.452.675	516.878.969	516.878.000
33.21.04.2019		19 Sidorejo	408.058.169	113.760.366	80.452.675	602.271.210	602.271.000
33.21.04.2020		20 Banjarsari	334.473.909	117.192.701	80.452.675	532.119.286	532.119.000
33.21.05	Karangtengah		3.920.034.217	1.097.375.098	1.367.695.473	6.385.104.789	6.385.098.000
33.21.05.2001		1 Ploso	187.305.389	52.734.208	80.452.675	320.492.272	320.492.000
33.21.05.2002		2 Grogol	260.889.649	49.827.975	80.452.675	391.170.299	391.170.000
33.21.05.2003		3 Pulosari	187.305.389	47.593.983	80.452.675	315.352.047	315.352.000
33.21.05.2004		4 Donorejo	279.285.714	107.902.038	80.452.675	467.640.427	467.640.000
33.21.05.2005		5 Pidodo	242.493.584	79.298.825	80.452.675	402.245.084	402.245.000
33.21.05.2006		6 Klitih	168.909.324	73.297.904	80.452.675	322.659.903	322.659.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.05.2007		7 Sampang	279.285.714	78.477.896	80.452.675	438.216.285	438.216.000
33.21.05.2008		8 Kedunguter	187.305.389	75.813.908	80.452.675	343.571.973	343.571.000
33.21.05.2009		9 Dukun	205.701.454	51.787.904	80.452.675	337.942.033	337.942.000
33.21.05.2010		10 Karang Sari	205.701.454	54.524.744	80.452.675	340.678.874	340.678.000
33.21.05.2011		11 Karangtowo	205.701.454	33.428.557	80.452.675	319.582.686	319.582.000
33.21.05.2012		12 Wonowoso	224.097.519	52.720.233	80.452.675	357.270.427	357.270.000
33.21.05.2013		13 Wonokerto	224.097.519	52.443.976	80.452.675	356.994.170	356.994.000
33.21.05.2014		14 Batu	352.869.974	69.654.543	80.452.675	502.977.193	502.977.000
33.21.05.2015		15 Rejosari	260.889.649	47.110.730	80.452.675	388.453.054	388.453.000
33.21.05.2016		16 Wonoagung	242.493.584	87.621.228	80.452.675	410.567.487	410.567.000
33.21.05.2017		17 Tambakbulusan	205.701.454	83.136.447	80.452.675	369.290.576	369.290.000
33.21.06	Wonosalam		4.632.463.644	1.381.843.639	1.689.506.173	7.703.813.456	7.703.805.000
33.21.06.2001		1 Doreng	242.493.584	85.792.934	80.452.675	408.739.193	408.739.000
33.21.06.2002		2 Kalianyar	242.493.584	101.223.533	80.452.675	424.169.792	424.169.000
33.21.06.2003		3 Tlogodowo	187.305.389	69.440.086	80.452.675	337.198.150	337.198.000
33.21.06.2004		4 Karangrowo	242.493.584	90.276.038	80.452.675	413.222.297	413.222.000
33.21.06.2005		5 Lempuyang	187.305.389	45.487.619	80.452.675	313.245.683	313.245.000
33.21.06.2006		6 Kendaldoyong	205.701.454	56.417.921	80.452.675	342.572.050	342.572.000
33.21.06.2007		7 Wonosalam	168.909.324	59.662.006	80.452.675	309.024.005	309.024.000
33.21.06.2008		8 Karangrejo	205.701.454	61.225.015	80.452.675	347.379.144	347.379.000
33.21.06.2009		9 Jogoloyo	168.909.324	51.008.884	80.452.675	300.370.883	300.370.000
33.21.06.2010		10 Botorejo	242.493.584	62.435.750	80.452.675	385.382.009	385.382.000
33.21.06.2011		11 Sidomulyo	205.701.454	56.424.231	80.452.675	342.578.361	342.578.000
33.21.06.2012		12 Pilangrejo	242.493.584	74.160.876	80.452.675	397.107.135	397.107.000
33.21.06.2013		13 Tlogorejo	242.493.584	71.670.693	80.452.675	394.616.952	394.616.000
33.21.06.2014		14 Kerangkulon	260.889.649	66.235.432	80.452.675	407.577.756	407.577.000
33.21.06.2015		15 Bunderan	168.909.324	66.592.064	80.452.675	315.954.064	315.954.000
33.21.06.2016		16 Getas	242.493.584	83.244.800	80.452.675	406.191.059	406.191.000
33.21.06.2017		17 Mojodemak	205.701.454	71.811.411	80.452.675	357.965.540	357.965.000
33.21.06.2018		18 Kuncir	279.285.714	56.872.320	80.452.675	416.610.709	416.610.000
33.21.06.2019		19 Trengguli	242.493.584	55.717.985	80.452.675	378.664.245	378.664.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.06.2020		20 Mrisen	205.701.454	51.496.854	80.452.675	337.650.983	337.650.000
33.21.06.2021		21 Mranak	242.493.584	44.647.186	80.452.675	367.593.446	367.593.000
31.21.07	Dempet		3.751.124.893	1.265.374.147	1.287.242.798	6.303.741.838	6.303.732.000
31.21.07.2001		1 Merak	260.889.649	71.273.146	80.452.675	412.615.470	412.615.000
31.21.07.2002		2 Karangrejo	224.097.519	50.866.473	80.452.675	355.416.667	355.416.000
31.21.07.2003		3 Dempet	205.701.454	138.302.620	80.452.675	424.456.749	424.456.000
31.21.07.2004		4 Botosengon	168.909.324	43.991.712	80.452.675	293.353.711	293.353.000
31.21.07.2005		5 Jerukgulang	224.097.519	60.204.611	80.452.675	364.754.805	364.754.000
31.21.07.2006		6 Kunir	297.681.779	87.140.479	80.452.675	465.274.933	465.274.000
31.21.07.2007		7 Brakas	187.305.389	77.540.376	80.452.675	345.298.440	345.298.000
31.21.07.2008		8 Balerejo	279.285.714	97.159.225	80.452.675	456.897.614	456.897.000
31.21.07.2009		9 Baleromo	242.493.584	79.009.317	80.452.675	401.955.576	401.955.000
31.21.07.2010		10 Kedungori	224.097.519	63.619.715	80.452.675	368.169.909	368.169.000
31.21.07.2011		11 Kuwu	168.909.324	91.140.241	80.452.675	340.502.241	340.502.000
31.21.07.2012		12 Kebonsari	205.701.454	59.151.799	80.452.675	345.305.928	345.305.000
31.21.07.2013		13 Gempoldenok	205.701.454	49.300.111	80.452.675	335.454.240	335.454.000
31.21.07.2014		14 Sidomulyo	279.285.714	125.598.991	80.452.675	485.337.380	485.337.000
31.21.07.2015		15 Harjowinangun	260.889.649	93.993.054	80.452.675	435.335.379	435.335.000
31.21.07.2016		16 Kramat	316.077.844	77.082.278	80.452.675	473.612.797	473.612.000
33.21.08	Gajah		3.463.477.331	1.022.935.167	1.448.148.148	5.934.560.646	5.934.670.000
33.21.08.2001		1 Surodadi	168.909.324	44.276.261	80.452.675	293.638.261	293.638.000
33.21.08.2002		2 Jatisono	150.513.259	52.070.949	80.452.675	283.036.883	283.036.000
33.21.08.2003		3 Kedondong	260.889.649	82.606.191	80.452.675	423.948.515	423.948.000
33.21.08.2004		4 Gedangalas	205.701.454	72.996.574	80.452.675	359.150.703	359.150.000
33.21.08.2005		5 Sambiroto	187.305.389	41.458.465	80.452.675	309.216.530	309.216.000
33.21.08.2006		6 Tanjunganyar	168.909.324	48.783.250	80.452.675	298.145.250	298.145.000
33.21.08.2007		7 Wilalung	168.909.324	49.631.861	80.452.675	298.993.860	298.993.000
33.21.08.2008		8 Medini	205.701.454	56.998.081	80.452.675	343.152.210	343.152.000
33.21.08.2009		9 Mlatiharjo	187.305.389	77.574.136	80.452.675	345.332.200	345.332.000
33.21.08.2010		10 Tambirejo	187.305.389	56.751.888	80.452.675	324.509.952	324.509.000
33.21.08.2011		11 Banjarsari	205.701.454	67.954.609	80.452.675	354.108.738	354.108.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.08.2012		12 Boyolali	150.513.259	38.922.368	80.452.675	269.888.302	270.007.000
33.21.08.2013		13 Gajah	224.097.519	40.355.737	80.452.675	344.905.931	344.905.000
33.21.08.2014		14 Sari	260.889.649	67.592.665	80.452.675	408.934.989	408.934.000
33.21.08.2015		15 Mlekang	224.097.519	58.588.870	80.452.675	363.139.064	363.139.000
33.21.08.2016		16 Sambung	187.305.389	53.387.057	80.452.675	321.145.121	321.145.000
33.21.08.2017		17 Tlogopandogan	168.909.324	63.133.139	80.452.675	312.495.138	312.495.000
33.21.08.2018		18 Mojosimo	150.513.259	49.853.064	80.452.675	280.818.998	280.818.000
33.21.09	Karanganyar		4.251.163.388	1.225.021.274	1.367.695.473	6.843.880.135	6.843.872.000
33.21.09.2001		1 Jatirejo	168.909.324	86.886.757	80.452.675	336.248.756	336.248.000
33.21.09.2002		2 Ngaluran	279.285.714	123.757.921	80.452.675	483.496.311	483.496.000
33.21.09.2003		3 Wonoketingal	224.097.519	90.356.525	80.452.675	394.906.719	394.906.000
33.21.09.2004		4 Cangkring Rembang	334.473.909	48.805.563	80.452.675	463.732.147	463.732.000
33.21.09.2005		5 Cangkring	279.285.714	60.612.985	80.452.675	420.351.374	420.351.000
33.21.09.2006		6 Tuwang	279.285.714	51.838.890	80.452.675	411.577.279	411.577.000
33.21.09.2007		7 Undaan Kidul	224.097.519	44.806.784	80.452.675	349.356.978	349.356.000
33.21.09.2008		8 Undaan Lor	205.701.454	40.508.718	80.452.675	326.662.847	326.662.000
33.21.09.2009		9 Ketanjung	224.097.519	55.829.306	80.452.675	360.379.500	360.379.000
33.21.09.2010		10 Ngeplikwetan	224.097.519	41.772.479	80.452.675	346.322.674	346.322.000
33.21.09.2011		11 Wonorejo	297.681.779	61.993.104	80.452.675	440.127.558	440.127.000
33.21.09.2012		12 Karanganyar	316.077.844	59.073.615	80.452.675	455.604.134	455.604.000
33.21.09.2013		13 Kedungwaru Kidul	297.681.779	81.700.028	80.452.675	459.834.482	459.834.000
33.21.09.2014		14 Kedungwaru Lor	224.097.519	93.817.194	80.452.675	398.367.388	398.367.000
33.21.09.2015		15 Bandungejo	224.097.519	83.405.817	80.452.675	387.956.011	387.956.000
33.21.09.2016		16 Tugu Lor	205.701.454	95.328.483	80.452.675	381.482.612	381.482.000
33.21.09.2017		17 Kotaan	242.493.584	104.527.105	80.452.675	427.473.365	427.473.000
33.21.10	Mijen		3.343.066.724	1.137.178.207	1.206.790.123	5.687.035.054	5.687.029.000
33.21.10.2001		1 Geneng	187.305.389	59.293.960	80.452.675	327.052.024	327.052.000
33.21.10.2002		2 Ngelowetan	187.305.389	50.657.489	80.452.675	318.415.553	318.415.000
33.21.10.2003		3 Mlaten	242.493.584	115.725.491	80.452.675	438.671.750	438.671.000
33.21.10.2004		4 Bantengmati	279.285.714	105.130.723	80.452.675	464.869.112	464.869.000
33.21.10.2005		5 Ngelokulon	205.701.454	62.623.486	80.452.675	348.777.615	348.777.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.10.2006		6 Pasir	279.285.714	155.896.612	80.452.675	515.635.001	515.635.000
33.21.10.2007		7 Rejosari	260.889.649	92.576.918	80.452.675	433.919.242	433.919.000
33.21.10.2008		8 Ngegot	187.305.389	66.987.240	80.452.675	334.745.304	334.745.000
33.21.10.2009		9 Jleper	260.889.649	83.076.488	80.452.675	424.418.813	424.418.000
33.21.10.2010		10 Pecuk	242.493.584	58.496.603	80.452.675	381.442.862	381.442.000
33.21.10.2011		11 Tanggul	205.701.454	60.977.686	80.452.675	347.131.815	347.131.000
33.21.10.2012		12 Bakung	242.493.584	59.584.074	80.452.675	382.530.333	382.530.000
33.21.10.2013		13 Bermi	187.305.389	71.118.321	80.452.675	338.876.385	338.876.000
33.21.10.2014		14 Mijen	205.701.454	54.697.043	80.452.675	340.851.172	340.851.000
33.21.10.2015		15 Gempolsongo	168.909.324	40.336.072	80.452.675	289.698.072	289.698.000
33.21.11	Demak		3.336.377.246	919.992.362	1.045.884.774	5.302.254.381	5.302.247.000
33.21.11.2001		1 Bolo	224.097.519	50.665.164	80.452.675	355.215.359	355.215.000
33.21.11.2002		2 Bango	279.285.714	75.950.003	80.452.675	435.688.392	435.688.000
33.21.11.2003		3 Kedondong	205.701.454	73.729.197	80.452.675	359.883.326	359.883.000
33.21.11.2004		4 Sedo	224.097.519	49.538.621	80.452.675	354.088.815	354.088.000
33.21.11.2005		5 Mulyorejo	279.285.714	67.390.388	80.452.675	427.128.777	427.128.000
33.21.11.2006		6 Turirejo	316.077.844	136.393.137	80.452.675	532.923.656	532.923.000
33.21.11.2007		7 Raji	242.493.584	80.824.298	80.452.675	403.770.557	403.770.000
33.21.11.2008		8 Cabean	260.889.649	70.764.272	80.452.675	412.106.596	412.106.000
33.21.11.2009		9 Tempuran	242.493.584	67.020.463	80.452.675	389.966.723	389.966.000
33.21.11.2010		10 Karangmlati	297.681.779	56.595.545	80.452.675	434.729.999	434.729.000
33.21.11.2011		11 Katonsari	224.097.519	45.614.973	80.452.675	350.165.168	350.165.000
33.21.11.2012		12 Kalikondang	297.681.779	63.904.230	80.452.675	442.038.684	442.038.000
33.21.11.2013		13 Donorojo	242.493.584	81.602.069	80.452.675	404.548.328	404.548.000
33.21.12	Bonang		5.294.721.985	2.602.598.565	1.689.506.173	9.586.826.722	9.586.819.000
33.21.12.2001		1 Jatimulyo	242.493.584	77.896.993	80.452.675	400.843.252	400.843.000
33.21.12.2002		2 Krajanbogo	260.889.649	99.931.688	80.452.675	441.274.012	441.274.000
33.21.12.2003		3 Sukodono	260.889.649	92.216.265	80.452.675	433.558.590	433.558.000
33.21.12.2004		4 Sumberejo	444.850.299	147.810.859	80.452.675	673.113.833	673.113.000
33.21.12.2005		5 Kembangan	260.889.649	97.282.054	80.452.675	438.624.378	438.624.000
33.21.12.2006		6 Karangrejo	297.681.779	159.937.170	80.452.675	538.071.625	538.071.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.12.2007		7 Gebangarum	260.889.649	96.708.831	80.452.675	438.051.155	438.051.000
33.21.12.2008		8 Gebang	242.493.584	158.051.406	80.452.675	480.997.665	480.997.000
33.21.12.2009		9 Margolinduk	113.721.129	120.769.765	80.452.675	314.943.569	314.943.000
33.21.12.2010		10 Morodemak	150.513.259	204.891.382	80.452.675	435.857.316	435.857.000
33.21.12.2011		11 Purworejo	242.493.584	284.710.748	80.452.675	607.657.007	607.657.000
33.21.12.2012		12 Betahwalang	205.701.454	121.804.046	80.452.675	407.958.175	407.958.000
33.21.12.2013		13 Serangan	187.305.389	65.449.608	80.452.675	333.207.672	333.207.000
33.21.12.2014		14 Tridonorejo	260.889.649	125.239.247	80.452.675	466.581.571	466.581.000
33.21.12.2015		15 Tlogoboyo	205.701.454	112.142.279	80.452.675	398.296.409	398.296.000
33.21.12.2016		16 Jatirogo	242.493.584	97.714.364	80.452.675	420.660.623	420.660.000
33.21.12.2017		17 Bonangrejo	224.097.519	89.751.817	80.452.675	394.302.012	394.302.000
33.21.12.2018		18 Poncoharjo	352.869.974	111.801.484	80.452.675	545.124.133	545.124.000
33.21.12.2019		19 Wonosari	224.097.519	94.473.843	80.452.675	399.024.037	399.024.000
33.21.12.2020		20 Jali	279.285.714	67.762.798	80.452.675	427.501.188	427.501.000
33.21.12.2021		21 Wedung	334.473.909	176.251.916	80.452.675	591.178.500	591.178.000
33.21.13	Wedung		4.279.593.670	1.884.428.731	1.609.053.498	7.773.075.898	7.773.066.000
33.21.13.2001		1 Wedung	297.681.779	169.117.325	80.452.675	547.251.779	547.251.000
33.21.13.2002		2 Ngawen	187.305.389	37.186.470	80.452.675	304.944.534	304.944.000
33.21.13.2003		3 Ruwit	260.889.649	74.451.188	80.452.675	415.793.512	415.793.000
33.21.13.2004		4 Kenduren	260.889.649	101.744.024	80.452.675	443.086.348	443.086.000
33.21.13.2005		5 Buko	224.097.519	65.086.087	80.452.675	369.636.281	369.636.000
33.21.13.2006		6 Mandung	168.909.324	42.394.191	80.452.675	291.756.190	291.756.000
33.21.13.2007		7 Berahan Kulon	187.305.389	66.366.750	80.452.675	334.124.814	334.124.000
33.21.13.2008		8 Berahan Wetan	279.285.714	163.999.621	80.452.675	523.738.010	523.738.000
33.21.13.2009		9 Bungo	242.493.584	87.587.645	80.452.675	410.533.904	410.533.000
33.21.13.2010		10 Tempel	205.701.454	74.291.717	80.452.675	360.445.846	360.445.000
33.21.13.2011		11 Jetak	168.909.324	95.431.989	80.452.675	344.793.988	344.793.000
33.21.13.2012		12 Jungsemi	224.097.519	88.390.059	80.452.675	392.940.253	392.940.000
33.21.13.2013		13 Jungpasir	205.701.454	73.813.269	80.452.675	359.967.398	359.967.000
33.21.13.2014		14 Mutihwetan	150.513.259	54.929.328	80.452.675	285.895.262	285.895.000
33.21.13.2015		15 Babalan	150.513.259	203.341.151	80.452.675	434.307.085	434.307.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.13.2016		16 Mutihkulon	260.889.649	93.642.677	80.452.675	434.985.001	434.985.000
33.21.13.2017		17 Tedunan	224.097.519	102.455.227	80.452.675	407.005.421	407.005.000
33.21.13.2018		18 Kendalasesem	168.909.324	69.449.848	80.452.675	318.811.847	318.811.000
33.21.13.2019		19 Kedungmutih	205.701.454	106.500.595	80.452.675	392.654.724	392.654.000
33.21.13.2020		20 Kedungkarang	205.701.454	114.249.572	80.452.675	400.403.701	400.403.000
33.21.14	Kebonagung		2.971.800.684	852.784.903	1.126.337.449	4.950.923.036	4.950.915.000
33.21.14.2001		1 Pilangwetan	187.305.389	39.242.695	80.452.675	307.000.760	307.000.000
33.21.14.2002		2 Kebonagug	297.681.779	90.397.007	80.452.675	468.531.461	468.531.000
33.21.14.2003		3 Klampok Lor	150.513.259	44.291.858	80.452.675	275.257.792	275.257.000
33.21.14.2004		4 Mijen	187.305.389	53.785.451	80.452.675	321.543.515	321.543.000
33.21.14.2005		5 Werdoyo	224.097.519	83.787.616	80.452.675	388.337.810	388.337.000
33.21.14.2006		6 Mangunrejo	279.285.714	63.555.839	80.452.675	423.294.228	423.294.000
33.21.14.2007		7 Babat	224.097.519	56.223.729	80.452.675	360.773.923	360.773.000
33.21.14.2008		8 Mangunanlor	187.305.389	56.760.030	80.452.675	324.518.094	324.518.000
33.21.14.2009		9 Tlogosih	224.097.519	74.712.555	80.452.675	379.262.749	379.262.000
33.21.14.2010		10 Prigi	187.305.389	55.136.742	80.452.675	322.894.806	322.894.000
33.21.14.2011		11 Sarimulyo	205.701.454	69.477.096	80.452.675	355.631.225	355.631.000
33.21.14.2012		12 Solowire	187.305.389	63.725.624	80.452.675	331.483.688	331.483.000
33.21.14.2013		13 Sokokidul	168.909.324	47.793.438	80.452.675	297.155.437	297.155.000
33.21.14.2014		14 Megonten	260.889.649	53.895.223	80.452.675	395.237.547	395.237.000
JUMLAH			58.650.000.000	19.550.000.000	19.550.000.000	97.750.000.000	97.750.000.000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.02.2001		1 Jragung	20	1	1	426.454.234	704.030.000	350.000.000	76.454.234
33.21.02.2002		2 Wonosekar	16	1	1	352.869.974	648.233.000	324.116.500	28.753.474
33.21.02.2003		3 Margohayu	11	1	1	260.889.649	474.474.000	260.889.649	-
33.21.02.2004		4 Teluk	10	1	1	242.493.584	401.038.000	240.622.800	1.870.784
33.21.02.2005		5 Tlogorejo	11	1	1	260.889.649	461.761.000	260.889.649	-
33.21.02.2006		6 Rejosari	20	1	1	426.454.234	713.613.000	350.000.000	76.454.234
33.21.02.2007		7 Karangawen	16	1	1	352.869.974	538.156.000	300.000.000	52.869.974
33.21.02.2008		8 Kuripan	14	1	1	316.077.844	485.324.000	291.194.400	24.883.444
33.21.02.2009		9 Bumirejo	13	1	1	297.681.779	483.727.000	290.236.200	7.445.579
33.21.02.2010		10 Brambang	16	1	1	352.869.974	574.972.000	300.000.000	52.869.974
33.21.02.2011		11 Sidorejo	17	1	1	371.266.039	571.611.000	300.000.000	71.266.039
33.21.02.2012		12 Pundenarum	14	1	1	316.077.844	484.728.000	290.836.800	25.241.044
33.21.03	Guntur								
33.21.03.2001		1 Blerong	13	1	1	297.681.779	476.906.000	286.143.600	11.538.179
33.21.03.2002		2 Banjarejo	8	1	1	205.701.454	349.332.000	205.701.454	-
33.21.03.2003		3 Wonorejo	8	1	1	205.701.454	365.525.000	205.701.454	-
33.21.03.2004		4 Sarirejo	7	1	1	187.305.389	331.916.000	187.305.389	-
33.21.03.2005		5 Pamongan	8	1	1	205.701.454	339.298.000	203.578.800	2.122.654
33.21.03.2006		6 Tlogoweru	9	1	1	224.097.519	361.400.000	216.840.000	7.257.519
33.21.03.2007		7 Bogosari	14	1	1	316.077.844	509.725.000	300.000.000	16.077.844
33.21.03.2008		8 Sukorejo	6	1	1	168.909.324	315.144.000	168.909.324	-
33.21.03.2009		9 Sidokumpul	8	1	1	205.701.454	356.130.000	205.701.454	-
33.21.03.2010		10 Gaji	7	1	1	187.305.389	326.661.000	187.305.389	-
33.21.03.2011		11 Krandon	6	1	1	168.909.324	309.769.000	168.909.324	-
33.21.03.2012		12 Tangkis	7	1	1	187.305.389	329.647.000	187.305.389	-
33.21.03.2013		13 Temuroso	14	1	1	316.077.844	581.190.000	300.000.000	16.077.844
33.21.03.2014		14 Bakalrejo	12	1	1	279.285.714	485.485.000	279.285.714	-

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.03.2015		15 Guntur	12	1	1	279.285.714	446.225.000	267.735.000	11.550.714
33.21.03.2016		16 Bumiharjo	11	1	1	260.889.649	418.791.000	251.274.600	9.615.049
33.21.03.2017		17 Tlogorejo	8	1	1	205.701.454	361.057.000	205.701.454	-
33.21.03.2018		18 Trimulyo	10	1	1	242.493.584	424.442.000	242.493.584	-
33.21.03.2019		19 Sidoharjo	9	1	1	224.097.519	391.908.000	224.097.519	-
33.21.03.2020		20 Turitempel	8	1	1	205.701.454	364.264.000	205.701.454	-
33.21.04	Sayung								
33.21.04.2001		1 Bulusari	13	1	1	297.681.779	436.738.000	262.042.800	35.638.979
33.21.04.2002		2 Dombo	7	1	1	187.305.389	315.593.000	187.305.389	-
33.21.04.2003		3 Jetaksari	9	1	1	224.097.519	372.042.000	223.225.200	872.319
33.21.04.2004		4 Kalisari	15	1	1	334.473.909	514.918.000	300.000.000	34.473.909
33.21.04.2005		5 Karangasem	7	1	1	187.305.389	314.755.000	187.305.389	-
33.21.04.2006		6 Prampelan	11	1	1	260.889.649	403.418.000	242.050.800	18.838.849
33.21.04.2007		7 Pilangsari	9	1	1	224.097.519	361.609.000	216.965.400	7.132.119
33.21.04.2008		8 Tambakroto	10	1	1	242.493.584	369.462.000	221.677.200	20.816.384
33.21.04.2009		9 Loireng	14	1	1	316.077.844	448.709.000	269.225.400	46.852.444
33.21.04.2010		10 Sayung	16	1	1	352.869.974	521.142.000	300.000.000	52.869.974
33.21.04.2011		11 Sriwulan	11	1	1	260.889.649	401.292.000	240.775.200	20.114.449
33.21.04.2012		12 Bedono	18	1	1	389.662.104	547.076.000	300.000.000	89.662.104
33.21.04.2013		13 Purwosari	13	1	1	297.681.779	436.325.000	261.795.000	35.886.779
33.21.04.2014		14 Sidogemah	14	1	1	316.077.844	491.278.000	294.766.800	21.311.044
33.21.04.2015		15 Gemulak	16	1	1	352.869.974	510.788.000	300.000.000	52.869.974
33.21.04.2016		16 Timbulsloko	11	1	1	260.889.649	451.013.000	260.889.649	-
33.21.04.2017		17 Surodadi	8	1	1	205.701.454	348.439.000	205.701.454	-
33.21.04.2018		18 Tugu	15	1	1	334.473.909	516.878.000	300.000.000	34.473.909
33.21.04.2019		19 Sidorejo	19	1	1	408.058.169	602.271.000	301.135.500	106.922.669
33.21.04.2020		20 Banjarsari	15	1	1	334.473.909	532.119.000	300.000.000	34.473.909

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.05	Karangtengah								
33.21.05.2001		1 Ploso	7	1	1	187.305.389	320.492.000	187.305.389	-
33.21.05.2002		2 Grogol	11	1	1	260.889.649	391.170.000	234.702.000	26.187.649
33.21.05.2003		3 Pulosari	7	1	1	187.305.389	315.352.000	187.305.389	-
33.21.05.2004		4 Donorejo	12	1	1	279.285.714	467.640.000	279.285.714	-
33.21.05.2005		5 Pidodo	10	1	1	242.493.584	402.245.000	241.347.000	1.146.584
33.21.05.2006		6 Klitih	6	1	1	168.909.324	322.659.000	168.909.324	-
33.21.05.2007		7 Sampang	12	1	1	279.285.714	438.216.000	262.929.600	16.356.114
33.21.05.2008		8 Kedunguter	7	1	1	187.305.389	343.571.000	187.305.389	-
33.21.05.2009		9 Dukun	8	1	1	205.701.454	337.942.000	202.765.200	2.936.254
33.21.05.2010		10 Karang Sari	8	1	1	205.701.454	340.678.000	204.406.800	1.294.654
33.21.05.2011		11 Karangtowo	8	1	1	205.701.454	319.582.000	191.749.200	13.952.254
33.21.05.2012		12 Wonowoso	9	1	1	224.097.519	357.270.000	214.362.000	9.735.519
33.21.05.2013		13 Wonokerto	9	1	1	224.097.519	356.994.000	214.196.400	9.901.119
33.21.05.2014		14 Batu	16	1	1	352.869.974	502.977.000	300.000.000	52.869.974
33.21.05.2015		15 Rejosari	11	1	1	260.889.649	388.453.000	233.071.800	27.817.849
33.21.05.2016		16 Wonoagung	10	1	1	242.493.584	410.567.000	242.493.584	-
33.21.05.2017		17 Tambakbulusan	8	1	1	205.701.454	369.290.000	205.701.454	-
33.21.06	Wonosalam								
33.21.06.2001		1 Doreng	10	1	1	242.493.584	408.739.000	242.493.584	-
33.21.06.2002		2 Kalianyar	10	1	1	242.493.584	424.169.000	242.493.584	-
33.21.06.2003		3 Tlogodowo	7	1	1	187.305.389	337.198.000	187.305.389	-
33.21.06.2004		4 Karangrowo	10	1	1	242.493.584	413.222.000	242.493.584	-
33.21.06.2005		5 Lempuyang	7	1	1	187.305.389	313.245.000	187.305.389	-
33.21.06.2006		6 Kendaldoyong	8	1	1	205.701.454	342.572.000	205.543.200	158.254
33.21.06.2007		7 Wonosalam	6	1	1	168.909.324	309.024.000	168.909.324	-
33.21.06.2008		8 Karangrejo	8	1	1	205.701.454	347.379.000	205.701.454	-

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.06.2009		9 Jogoloyo	6	1	1	168.909.324	300.370.000	168.909.324	-
33.21.06.2010		10 Botorejo	10	1	1	242.493.584	385.382.000	231.229.200	11.264.384
33.21.06.2011		11 Sidomulyo	8	1	1	205.701.454	342.578.000	205.546.800	154.654
33.21.06.2012		12 Pilangrejo	10	1	1	242.493.584	397.107.000	238.264.200	4.229.384
33.21.06.2013		13 Tlogorejo	10	1	1	242.493.584	394.616.000	236.769.600	5.723.984
33.21.06.2014		14 Kerangkulon	11	1	1	260.889.649	407.577.000	244.546.200	16.343.449
33.21.06.2015		15 Bunderan	6	1	1	168.909.324	315.954.000	168.909.324	-
33.21.06.2016		16 Getas	10	1	1	242.493.584	406.191.000	242.493.584	-
33.21.06.2017		17 Mojodemak	8	1	1	205.701.454	357.965.000	205.701.454	-
33.21.06.2018		18 Kuncir	12	1	1	279.285.714	416.610.000	249.966.000	29.319.714
33.21.06.2019		19 Trengguli	10	1	1	242.493.584	378.664.000	227.198.400	15.295.184
33.21.06.2020		20 Mrisen	8	1	1	205.701.454	337.650.000	202.590.000	3.111.454
33.21.06.2021		21 Mranak	10	1	1	242.493.584	367.593.000	220.555.800	21.937.784
31.21.07	Dempet								
31.21.07.2001		1 Merak	11	1	1	260.889.649	412.615.000	247.569.000	13.320.649
31.21.07.2002		2 Karangrejo	9	1	1	224.097.519	355.416.000	213.249.600	10.847.919
31.21.07.2003		3 Dempet	8	1	1	205.701.454	424.456.000	205.701.454	-
31.21.07.2004		4 Botosengon	6	1	1	168.909.324	293.353.000	168.909.324	-
31.21.07.2005		5 Jerukgulung	9	1	1	224.097.519	364.754.000	218.852.400	5.245.119
31.21.07.2006		6 Kunir	13	1	1	297.681.779	465.274.000	279.164.400	18.517.379
31.21.07.2007		7 Brakas	7	1	1	187.305.389	345.298.000	187.305.389	-
31.21.07.2008		8 Balerejo	12	1	1	279.285.714	456.897.000	274.138.200	5.147.514
31.21.07.2009		9 Baleromo	10	1	1	242.493.584	401.955.000	241.173.000	1.320.584
31.21.07.2010		10 Kedungori	9	1	1	224.097.519	368.169.000	220.901.400	3.196.119
31.21.07.2011		11 Kuwu	6	1	1	168.909.324	340.502.000	168.909.324	-
31.21.07.2012		12 Kebonsari	8	1	1	205.701.454	345.305.000	205.701.454	-
31.21.07.2013		13 Gempoldenok	8	1	1	205.701.454	335.454.000	201.272.400	4.429.054

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.21.07.2014		14 Sidomulyo	12	1	1	279.285.714	485.337.000	279.285.714	-
31.21.07.2015		15 Harjowinangun	11	1	1	260.889.649	435.335.000	260.889.649	-
31.21.07.2016		16 Kramat	14	1	1	316.077.844	473.612.000	284.167.200	31.910.644
33.21.08	Gajah								
33.21.08.2001		1 Surodadi	6	1	1	168.909.324	293.638.000	168.909.324	-
33.21.08.2002		2 Jatisono	5	1	1	150.513.259	283.036.000	150.513.259	-
33.21.08.2003		3 Kedondong	11	1	1	260.889.649	423.948.000	254.368.800	6.520.849
33.21.08.2004		4 Gedangalas	8	1	1	205.701.454	359.150.000	205.701.454	-
33.21.08.2005		5 Sambiroto	7	1	1	187.305.389	309.216.000	185.529.600	1.775.789
33.21.08.2006		6 Tanjunganyar	6	1	1	168.909.324	298.145.000	168.909.324	-
33.21.08.2007		7 Wilalung	6	1	1	168.909.324	298.993.000	168.909.324	-
33.21.08.2008		8 Medini	8	1	1	205.701.454	343.152.000	205.701.454	-
33.21.08.2009		9 Mlatiharjo	7	1	1	187.305.389	345.332.000	187.305.389	-
33.21.08.2010		10 Tambirejo	7	1	1	187.305.389	324.509.000	187.305.389	-
33.21.08.2011		11 Banjarsari	8	1	1	205.701.454	354.108.000	205.701.454	-
33.21.08.2012		12 Boyolali	5	1	1	150.513.259	270.007.000	150.513.259	-
33.21.08.2013		13 Gajah	9	1	1	224.097.519	344.905.000	206.943.000	17.154.519
33.21.08.2014		14 Sari	11	1	1	260.889.649	408.934.000	245.360.400	15.529.249
33.21.08.2015		15 Mlekang	9	1	1	224.097.519	363.139.000	217.883.400	6.214.119
33.21.08.2016		16 Sambung	7	1	1	187.305.389	321.145.000	187.305.389	-
33.21.08.2017		17 Tlogopandogan	6	1	1	168.909.324	312.495.000	168.909.324	-
33.21.08.2018		18 Mojosimo	5	1	1	150.513.259	280.818.000	150.513.259	-
33.21.09	Karanganyar								
33.21.09.2001		1 Jatirejo	6	1	1	168.909.324	336.248.000	168.909.324	-
33.21.09.2002		2 Ngaluran	12	1	1	279.285.714	483.496.000	279.285.714	-
33.21.09.2003		3 Wonoketingal	9	1	1	224.097.519	394.906.000	224.097.519	-
33.21.09.2004		4 Cangkring Rembang	15	1	1	334.473.909	463.732.000	278.239.200	56.234.709

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.09.2005		5 Cangkring	12	1	1	279.285.714	420.351.000	252.210.600	27.075.114
33.21.09.2006		6 Tuwang	12	1	1	279.285.714	411.577.000	246.946.200	32.339.514
33.21.09.2007		7 Undaan Kidul	9	1	1	224.097.519	349.356.000	209.613.600	14.483.919
33.21.09.2008		8 Undaan Lor	8	1	1	205.701.454	326.662.000	195.997.200	9.704.254
33.21.09.2009		9 Ketanjung	9	1	1	224.097.519	360.379.000	216.227.400	7.870.119
33.21.09.2010		10 Ngemplikwetan	9	1	1	224.097.519	346.322.000	207.793.200	16.304.319
33.21.09.2011		11 Wonorejo	13	1	1	297.681.779	440.127.000	264.076.200	33.605.579
33.21.09.2012		12 Karanganyar	14	1	1	316.077.844	455.604.000	273.362.400	42.715.444
33.21.09.2013		13 Kedungwaru Kidul	13	1	1	297.681.779	459.834.000	275.900.400	21.781.379
33.21.09.2014		14 Kedungwaru Lor	9	1	1	224.097.519	398.367.000	224.097.519	-
33.21.09.2015		15 Bandungrejo	9	1	1	224.097.519	387.956.000	224.097.519	-
33.21.09.2016		16 Tugu Lor	8	1	1	205.701.454	381.482.000	205.701.454	-
33.21.09.2017		17 Kotaan	10	1	1	242.493.584	427.473.000	242.493.584	-
33.21.10	Mijen								
33.21.10.2001		1 Geneng	7	1	1	187.305.389	327.052.000	187.305.389	-
33.21.10.2002		2 Ngelowetan	7	1	1	187.305.389	318.415.000	187.305.389	-
33.21.10.2003		3 Mlaten	10	1	1	242.493.584	438.671.000	242.493.584	-
33.21.10.2004		4 Bantengmati	12	1	1	279.285.714	464.869.000	278.921.400	364.314
33.21.10.2005		5 Ngelokulon	8	1	1	205.701.454	348.777.000	205.701.454	-
33.21.10.2006		6 Pasir	12	1	1	279.285.714	515.635.000	279.285.714	-
33.21.10.2007		7 Rejosari	11	1	1	260.889.649	433.919.000	260.351.400	538.249
33.21.10.2008		8 Ngegot	7	1	1	187.305.389	334.745.000	187.305.389	-
33.21.10.2009		9 Jleper	11	1	1	260.889.649	424.418.000	254.650.800	6.238.849
33.21.10.2010		10 Pecuk	10	1	1	242.493.584	381.442.000	228.865.200	13.628.384
33.21.10.2011		11 Tanggul	8	1	1	205.701.454	347.131.000	205.701.454	-
33.21.10.2012		12 Bakung	10	1	1	242.493.584	382.530.000	229.518.000	12.975.584
33.21.10.2013		13 Bermi	7	1	1	187.305.389	338.876.000	187.305.389	-

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.10.2014		14 Mijen	8	1	1	205.701.454	340.851.000	204.510.600	1.190.854
33.21.10.2015		15 Gempolsongo	6	1	1	168.909.324	289.698.000	168.909.324	-
33.21.11	Demak								
33.21.11.2001		1 Bolo	9	1	1	224.097.519	355.215.000	213.129.000	10.968.519
33.21.11.2002		2 Bango	12	1	1	279.285.714	435.688.000	261.412.800	17.872.914
33.21.11.2003		3 Kedondong	8	1	1	205.701.454	359.883.000	205.701.454	-
33.21.11.2004		4 Sedo	9	1	1	224.097.519	354.088.000	212.452.800	11.644.719
33.21.11.2005		5 Mulyorejo	12	1	1	279.285.714	427.128.000	256.276.800	23.008.914
33.21.11.2006		6 Turirejo	14	1	1	316.077.844	532.923.000	300.000.000	16.077.844
33.21.11.2007		7 Raji	10	1	1	242.493.584	403.770.000	242.262.000	231.584
33.21.11.2008		8 Cabean	11	1	1	260.889.649	412.106.000	247.263.600	13.626.049
33.21.11.2009		9 Tempuran	10	1	1	242.493.584	389.966.000	233.979.600	8.513.984
33.21.11.2010		10 Karangmlati	13	1	1	297.681.779	434.729.000	260.837.400	36.844.379
33.21.11.2011		11 Katonsari	9	1	1	224.097.519	350.165.000	210.099.000	13.998.519
33.21.11.2012		12 Kalikondang	13	1	1	297.681.779	442.038.000	265.222.800	32.458.979
33.21.11.2013		13 Donorojo	10	1	1	242.493.584	404.548.000	242.493.584	-
33.21.12	Bonang								
33.21.12.2001		1 Jatimulyo	10	1	1	242.493.584	400.843.000	240.505.800	1.987.784
33.21.12.2002		2 Krajanbogo	11	1	1	260.889.649	441.274.000	260.889.649	-
33.21.12.2003		3 Sukodono	11	1	1	260.889.649	433.558.000	260.134.800	754.849
33.21.12.2004		4 Sumberejo	21	1	1	444.850.299	673.113.000	336.556.500	108.293.799
33.21.12.2005		5 Kembangan	11	1	1	260.889.649	438.624.000	260.889.649	-
33.21.12.2006		6 Karangrejo	13	1	1	297.681.779	538.071.000	297.681.779	-
33.21.12.2007		7 Gebangrum	11	1	1	260.889.649	438.051.000	260.889.649	-
33.21.12.2008		8 Gebang	10	1	1	242.493.584	480.997.000	242.493.584	-
33.21.12.2009		9 Margolinduk	3	1	1	113.721.129	314.943.000	113.721.129	-
33.21.12.2010		10 Morodemak	5	1	1	150.513.259	435.857.000	150.513.259	-

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.12.2011		11 Purworejo	10	1	1	242.493.584	607.657.000	242.493.584	-
33.21.12.2012		12 Betahwalang	8	1	1	205.701.454	407.958.000	205.701.454	-
33.21.12.2013		13 Serangan	7	1	1	187.305.389	333.207.000	187.305.389	-
33.21.12.2014		14 Tridonorejo	11	1	1	260.889.649	466.581.000	260.889.649	-
33.21.12.2015		15 Tlogoboyo	8	1	1	205.701.454	398.296.000	205.701.454	-
33.21.12.2016		16 Jatirogo	10	1	1	242.493.584	420.660.000	242.493.584	-
33.21.12.2017		17 Bonangrejo	9	1	1	224.097.519	394.302.000	224.097.519	-
33.21.12.2018		18 Poncoharjo	16	1	1	352.869.974	545.124.000	300.000.000	52.869.974
33.21.12.2019		19 Wonosari	9	1	1	224.097.519	399.024.000	224.097.519	-
33.21.12.2020		20 Jali	12	1	1	279.285.714	427.501.000	256.500.600	22.785.114
33.21.12.2021		21 Weding	15	1	1	334.473.909	591.178.000	300.000.000	34.473.909
33.21.13	Wedung								
33.21.13.2001		1 Wedung	13	1	1	297.681.779	547.251.000	297.681.779	-
33.21.13.2002		2 Ngawen	7	1	1	187.305.389	304.944.000	182.966.400	4.338.989
33.21.13.2003		3 Ruwit	11	1	1	260.889.649	415.793.000	249.475.800	11.413.849
33.21.13.2004		4 Kenduren	11	1	1	260.889.649	443.086.000	260.889.649	-
33.21.13.2005		5 Buko	9	1	1	224.097.519	369.636.000	221.781.600	2.315.919
33.21.13.2006		6 Mandung	6	1	1	168.909.324	291.756.000	168.909.324	-
33.21.13.2007		7 Berahan Kulon	7	1	1	187.305.389	334.124.000	187.305.389	-
33.21.13.2008		8 Berahan Wetan	12	1	1	279.285.714	523.738.000	279.285.714	-
33.21.13.2009		9 Bungo	10	1	1	242.493.584	410.533.000	242.493.584	-
33.21.13.2010		10 Tempel	8	1	1	205.701.454	360.445.000	205.701.454	-
33.21.13.2011		11 Jetak	6	1	1	168.909.324	344.793.000	168.909.324	-
33.21.13.2012		12 Jungsemi	9	1	1	224.097.519	392.940.000	224.097.519	-
33.21.13.2013		13 Jungpasir	8	1	1	205.701.454	359.967.000	205.701.454	-
33.21.13.2014		14 Mutihwetan	5	1	1	150.513.259	285.895.000	150.513.259	-
33.21.13.2015		15 Babalan	5	1	1	150.513.259	434.307.000	150.513.259	-

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP (SILTAP) MAKSIMAL
DIKABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH KADES	JUMLAH SEKDES	PERHITUNGAN DASAR SILTAP PERANGKAT DESA	PENERIMAAN ADD TOTAL	ALOKASI SILTAP MAKSIMAL	ADD SISA SILTAP PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.21.13.2016		16 Mutihkulon	11	1	1	260.889.649	434.985.000	260.889.649	-
33.21.13.2017		17 Tedunan	9	1	1	224.097.519	407.005.000	224.097.519	-
33.21.13.2018		18 Kendalasesem	6	1	1	168.909.324	318.811.000	168.909.324	-
33.21.13.2019		19 Kedungmutih	8	1	1	205.701.454	392.654.000	205.701.454	-
33.21.13.2020		20 Kedungkarang	8	1	1	205.701.454	400.403.000	205.701.454	-
33.21.14	Kebonagung								
33.21.14.2001		1 Pilangwetan	7	1	1	187.305.389	307.000.000	184.200.000	3.105.389
33.21.14.2002		2 Kebonagug	13	1	1	297.681.779	468.531.000	281.118.600	16.563.179
33.21.14.2003		3 Klampok Lor	5	1	1	150.513.259	275.257.000	150.513.259	-
33.21.14.2004		4 Mijen	7	1	1	187.305.389	321.543.000	187.305.389	-
33.21.14.2005		5 Werdoyo	9	1	1	224.097.519	388.337.000	224.097.519	-
33.21.14.2006		6 Mangunrejo	12	1	1	279.285.714	423.294.000	253.976.400	25.309.314
33.21.14.2007		7 Babat	9	1	1	224.097.519	360.773.000	216.463.800	7.633.719
33.21.14.2008		8 Mangunanlor	7	1	1	187.305.389	324.518.000	187.305.389	-
33.21.14.2009		9 Tlogosih	9	1	1	224.097.519	379.262.000	224.097.519	-
33.21.14.2010		10 Prigi	7	1	1	187.305.389	322.894.000	187.305.389	-
33.21.14.2011		11 Sarimulyo	8	1	1	205.701.454	355.631.000	205.701.454	-
33.21.14.2012		12 Solowire	7	1	1	187.305.389	331.483.000	187.305.389	-
33.21.14.2013		13 Sokokidul	6	1	1	168.909.324	297.155.000	168.909.324	-
33.21.14.2014		14 Megonten	11	1	1	260.889.649	395.237.000	237.142.200	23.747.449
JUMLAH			2.415	243	243	58.650.000.000	97.750.000.000	55.980.548.599	2.669.451.401

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

**TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	2	3	4	5	6
33.21.01	Mranggen		7.996.400.000	4.797.840.000	3.198.560.000
33.21.01.2001		1 Banyumeneng	503.477.000	302.086.200	201.390.800
33.21.01.2002		2 Kabonbatur	498.702.000	299.221.200	199.480.800
33.21.01.2003		3 Sumberrejo	483.706.000	290.223.600	193.482.400
33.21.01.2004		4 Kalitengah	364.798.000	218.878.800	145.919.200
33.21.01.2005		5 Kangkung	423.861.000	254.316.600	169.544.400
33.21.01.2006		6 Mranggen	336.809.000	202.085.400	134.723.600
33.21.01.2007		7 Batusari	576.696.000	346.017.600	230.678.400
33.21.01.2008		8 Bandungrejo	366.005.000	219.603.000	146.402.000
33.21.01.2009		9 Brumbung	299.833.000	179.899.800	119.933.200
33.21.01.2010		10 Kembangarum	466.083.000	279.649.800	186.433.200
33.21.01.2011		11 Karangsono	469.584.000	281.750.400	187.833.600
33.21.01.2012		12 Tamansari	357.520.000	214.512.000	143.008.000
33.21.01.2013		13 Ngemplak	341.144.000	204.686.400	136.457.600
33.21.01.2014		14 Menur	419.923.000	251.953.800	167.969.200
33.21.01.2015		15 Jamus	478.579.000	287.147.400	191.431.600
33.21.01.2016		16 Wringinjajar	418.459.000	251.075.400	167.383.600
33.21.01.2017		17 Waru	356.753.000	214.051.800	142.701.200
33.21.01.2018		18 Tegalarum	412.675.000	247.605.000	165.070.000
33.21.01.2019		19 Candisari	421.793.000	253.075.800	168.717.200
33.21.02	Karangawen		6.541.667.000	3.925.000.200	2.616.666.800
33.21.02.2001		1 Jragung	704.030.000	422.418.000	281.612.000
33.21.02.2002		2 Wonosekar	648.233.000	388.939.800	259.293.200
33.21.02.2003		3 Margohayu	474.474.000	284.684.400	189.789.600
33.21.02.2004		4 Teluk	401.038.000	240.622.800	160.415.200
33.21.02.2005		5 Tlogorejo	461.761.000	277.056.600	184.704.400
33.21.02.2006		6 Rejosari	713.613.000	428.167.800	285.445.200
33.21.02.2007		7 Karangawen	538.156.000	322.893.600	215.262.400
33.21.02.2008		8 Kuripan	485.324.000	291.194.400	194.129.600
33.21.02.2009		9 Bumirejo	483.727.000	290.236.200	193.490.800
33.21.02.2010		10 Brambang	574.972.000	344.983.200	229.988.800
33.21.02.2011		11 Sidorejo	571.611.000	342.966.600	228.644.400
33.21.02.2012		12 Pundenarum	484.728.000	290.836.800	193.891.200
33.21.03	Guntur		7.844.815.000	4.706.889.000	3.137.926.000
33.21.03.2001		1 Blerong	476.906.000	286.143.600	190.762.400
33.21.03.2002		2 Banjarejo	349.332.000	209.599.200	139.732.800
33.21.03.2003		3 Wonorejo	365.525.000	219.315.000	146.210.000
33.21.03.2004		4 Sarirejo	331.916.000	199.149.600	132.766.400
33.21.03.2005		5 Pamongan	339.298.000	203.578.800	135.719.200
33.21.03.2006		6 Tlogoweru	361.400.000	216.840.000	144.560.000
33.21.03.2007		7 Bogosari	509.725.000	305.835.000	203.890.000
33.21.03.2008		8 Sukorejo	315.144.000	189.086.400	126.057.600
33.21.03.2009		9 Sidokumpul	356.130.000	213.678.000	142.452.000
33.21.03.2010		10 Gaji	326.661.000	195.996.600	130.664.400
33.21.03.2011		11 Krandon	309.769.000	185.861.400	123.907.600
33.21.03.2012		12 Tangkis	329.647.000	197.788.200	131.858.800
33.21.03.2013		13 Temuroso	581.190.000	348.714.000	232.476.000
33.21.03.2014		14 Bakalrejo	485.485.000	291.291.000	194.194.000
33.21.03.2015		15 Guntur	446.225.000	267.735.000	178.490.000
33.21.03.2016		16 Bumiharjo	418.791.000	251.274.600	167.516.400
33.21.03.2017		17 Tlogorejo	361.057.000	216.634.200	144.422.800
33.21.03.2018		18 Trimulyo	424.442.000	254.665.200	169.776.800
33.21.03.2019		19 Sidoharjo	391.908.000	235.144.800	156.763.200
33.21.03.2020		20 Turitempel	364.264.000	218.558.400	145.705.600
33.21.04	Sayung		8.895.865.000	5.337.519.000	3.558.346.000
33.21.04.2001		1 Bulusari	436.738.000	262.042.800	174.695.200
33.21.04.2002		2 Dombo	315.593.000	189.355.800	126.237.200
33.21.04.2003		3 Jetaksari	372.042.000	223.225.200	148.816.800
33.21.04.2004		4 Kalisari	514.918.000	308.950.800	205.967.200
33.21.04.2005		5 Karangasem	314.755.000	188.853.000	125.902.000
33.21.04.2006		6 Prampelan	403.418.000	242.050.800	161.367.200
33.21.04.2007		7 Pilangsari	361.609.000	216.965.400	144.643.600
33.21.04.2008		8 Tambakroto	369.462.000	221.677.200	147.784.800
33.21.04.2009		9 Loireng	448.709.000	269.225.400	179.483.600
33.21.04.2010		10 Sayung	521.142.000	312.685.200	208.456.800
33.21.04.2011		11 Sriwulan	401.292.000	240.775.200	160.516.800
33.21.04.2012		12 Bedono	547.076.000	328.245.600	218.830.400
33.21.04.2013		13 Purwosari	436.325.000	261.795.000	174.530.000
33.21.04.2014		14 Sidogemah	491.278.000	294.766.800	196.511.200

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	2	3	4	5	6
33.21.04.2015		15 Gemulak	510.788.000	306.472.800	204.315.200
33.21.04.2016		16 Timbulsloko	451.013.000	270.607.800	180.405.200
33.21.04.2017		17 Surodadi	348.439.000	209.063.400	139.375.600
33.21.04.2018		18 Tugu	516.878.000	310.126.800	206.751.200
33.21.04.2019		19 Sidorejo	602.271.000	361.362.600	240.908.400
33.21.04.2020		20 Banjarsari	532.119.000	319.271.400	212.847.600
33.21.05	Karangtengah		6.385.098.000	3.831.058.800	2.554.039.200
33.21.05.2001		1 Ploso	320.492.000	192.295.200	128.196.800
33.21.05.2002		2 Grogol	391.170.000	234.702.000	156.468.000
33.21.05.2003		3 Pulosari	315.352.000	189.211.200	126.140.800
33.21.05.2004		4 Donorejo	467.640.000	280.584.000	187.056.000
33.21.05.2005		5 Pidodo	402.245.000	241.347.000	160.898.000
33.21.05.2006		6 Klitih	322.659.000	193.595.400	129.063.600
33.21.05.2007		7 Sampang	438.216.000	262.929.600	175.286.400
33.21.05.2008		8 Kedunguter	343.571.000	206.142.600	137.428.400
33.21.05.2009		9 Dukun	337.942.000	202.765.200	135.176.800
33.21.05.2010		10 Karang Sari	340.678.000	204.406.800	136.271.200
33.21.05.2011		11 Karangtowo	319.582.000	191.749.200	127.832.800
33.21.05.2012		12 Wonowoso	357.270.000	214.362.000	142.908.000
33.21.05.2013		13 Wonokerto	356.994.000	214.196.400	142.797.600
33.21.05.2014		14 Batu	502.977.000	301.786.200	201.190.800
33.21.05.2015		15 Rejosari	388.453.000	233.071.800	155.381.200
33.21.05.2016		16 Wonoagung	410.567.000	246.340.200	164.226.800
33.21.05.2017		17 Tambakbulusan	369.290.000	221.574.000	147.716.000
33.21.06	Wonosalam		7.703.805.000	4.622.283.000	3.081.522.000
33.21.06.2001		1 Doreng	408.739.000	245.243.400	163.495.600
33.21.06.2002		2 Kalianyar	424.169.000	254.501.400	169.667.600
33.21.06.2003		3 Tlogodowo	337.198.000	202.318.800	134.879.200
33.21.06.2004		4 Karangrowo	413.222.000	247.933.200	165.288.800
33.21.06.2005		5 Lempuyang	313.245.000	187.947.000	125.298.000
33.21.06.2006		6 Kendaldoyong	342.572.000	205.543.200	137.028.800
33.21.06.2007		7 Wonosalam	309.024.000	185.414.400	123.609.600
33.21.06.2008		8 Karangrejo	347.379.000	208.427.400	138.951.600
33.21.06.2009		9 Jogoloyo	300.370.000	180.222.000	120.148.000
33.21.06.2010		10 Botorejo	385.382.000	231.229.200	154.152.800
33.21.06.2011		11 Sidomulyo	342.578.000	205.546.800	137.031.200
33.21.06.2012		12 Pilangrejo	397.107.000	238.264.200	158.842.800
33.21.06.2013		13 Tlogorejo	394.616.000	236.769.600	157.846.400
33.21.06.2014		14 Kerangkulon	407.577.000	244.546.200	163.030.800
33.21.06.2015		15 Bunderan	315.954.000	189.572.400	126.381.600
33.21.06.2016		16 Getas	406.191.000	243.714.600	162.476.400
33.21.06.2017		17 Mojodemak	357.965.000	214.779.000	143.186.000
33.21.06.2018		18 Kuncir	416.610.000	249.966.000	166.644.000
33.21.06.2019		19 Trengguli	378.664.000	227.198.400	151.465.600
33.21.06.2020		20 Mrisen	337.650.000	202.590.000	135.060.000
33.21.06.2021		21 Mranak	367.593.000	220.555.800	147.037.200
31.21.07	Dempet		6.303.732.000	3.782.239.200	2.521.492.800
31.21.07.2001		1 Merak	412.615.000	247.569.000	165.046.000
31.21.07.2002		2 Karangrejo	355.416.000	213.249.600	142.166.400
31.21.07.2003		3 Dempet	424.456.000	254.673.600	169.782.400
31.21.07.2004		4 Botosengon	293.353.000	176.011.800	117.341.200
31.21.07.2005		5 Jerukgulang	364.754.000	218.852.400	145.901.600
31.21.07.2006		6 Kunir	465.274.000	279.164.400	186.109.600
31.21.07.2007		7 Brakas	345.298.000	207.178.800	138.119.200
31.21.07.2008		8 Balerejo	456.897.000	274.138.200	182.758.800
31.21.07.2009		9 Baleromo	401.955.000	241.173.000	160.782.000
31.21.07.2010		10 Kedungori	368.169.000	220.901.400	147.267.600
31.21.07.2011		11 Kuwu	340.502.000	204.301.200	136.200.800
31.21.07.2012		12 Kebonsari	345.305.000	207.183.000	138.122.000
31.21.07.2013		13 Gempoldenok	335.454.000	201.272.400	134.181.600
31.21.07.2014		14 Sidomulyo	485.337.000	291.202.200	194.134.800
31.21.07.2015		15 Harjowinangun	435.335.000	261.201.000	174.134.000
31.21.07.2016		16 Kramat	473.612.000	284.167.200	189.444.800
33.21.08	Gajah		5.934.670.000	3.560.802.000	2.373.868.000
33.21.08.2001		1 Surodadi	293.638.000	176.182.800	117.455.200
33.21.08.2002		2 Jatisono	283.036.000	169.821.600	113.214.400
33.21.08.2003		3 Kedondong	423.948.000	254.368.800	169.579.200
33.21.08.2004		4 Gedangalas	359.150.000	215.490.000	143.660.000
33.21.08.2005		5 Sambiroto	309.216.000	185.529.600	123.686.400
33.21.08.2006		6 Tanjunganyar	298.145.000	178.887.000	119.258.000
33.21.08.2007		7 Wilalung	298.993.000	179.395.800	119.597.200
33.21.08.2008		8 Medini	343.152.000	205.891.200	137.260.800
33.21.08.2009		9 Mlatiharjo	345.332.000	207.199.200	138.132.800
33.21.08.2010		10 Tambirejo	324.509.000	194.705.400	129.803.600
33.21.08.2011		11 Banjarsari	354.108.000	212.464.800	141.643.200
33.21.08.2012		12 Boyolali	270.007.000	162.004.200	108.002.800
33.21.08.2013		13 Gajah	344.905.000	206.943.000	137.962.000
33.21.08.2014		14 Sari	408.934.000	245.360.400	163.573.600
33.21.08.2015		15 Mlekang	363.139.000	217.883.400	145.255.600
33.21.08.2016		16 Sambung	321.145.000	192.687.000	128.458.000

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	2	3	4	5	6
33.21.08.2017		17 Tlogopandogan	312.495.000	187.497.000	124.998.000
33.21.08.2018		18 Mojosimo	280.818.000	168.490.800	112.327.200
33.21.09	Karanganyar		6.843.872.000	4.106.323.200	2.737.548.800
33.21.09.2001		1 Jatirejo	336.248.000	201.748.800	134.499.200
33.21.09.2002		2 Ngaluran	483.496.000	290.097.600	193.398.400
33.21.09.2003		3 Wonoketingal	394.906.000	236.943.600	157.962.400
33.21.09.2004		4 Cangkring Rembang	463.732.000	278.239.200	185.492.800
33.21.09.2005		5 Cangkring	420.351.000	252.210.600	168.140.400
33.21.09.2006		6 Tuwang	411.577.000	246.946.200	164.630.800
33.21.09.2007		7 Undaan Kidul	349.356.000	209.613.600	139.742.400
33.21.09.2008		8 Undaan Lor	326.662.000	195.997.200	130.664.800
33.21.09.2009		9 Ketanjung	360.379.000	216.227.400	144.151.600
33.21.09.2010		10 Ngemplikwetan	346.322.000	207.793.200	138.528.800
33.21.09.2011		11 Wonorejo	440.127.000	264.076.200	176.050.800
33.21.09.2012		12 Karanganyar	455.604.000	273.362.400	182.241.600
33.21.09.2013		13 Kedungwaru Kidul	459.834.000	275.900.400	183.933.600
33.21.09.2014		14 Kedungwaru Lor	398.367.000	239.020.200	159.346.800
33.21.09.2015		15 Bandungrejo	387.956.000	232.773.600	155.182.400
33.21.09.2016		16 Tugu Lor	381.482.000	228.889.200	152.592.800
33.21.09.2017		17 Kotaan	427.473.000	256.483.800	170.989.200
33.21.10	Mijen		5.687.029.000	3.412.217.400	2.274.811.600
33.21.10.2001		1 Geneng	327.052.000	196.231.200	130.820.800
33.21.10.2002		2 Ngelowetan	318.415.000	191.049.000	127.366.000
33.21.10.2003		3 Mlaten	438.671.000	263.202.600	175.468.400
33.21.10.2004		4 Bantengmati	464.869.000	278.921.400	185.947.600
33.21.10.2005		5 Ngelokulon	348.777.000	209.266.200	139.510.800
33.21.10.2006		6 Pasir	515.635.000	309.381.000	206.254.000
33.21.10.2007		7 Rejosari	433.919.000	260.351.400	173.567.600
33.21.10.2008		8 Ngegot	334.745.000	200.847.000	133.898.000
33.21.10.2009		9 Jleper	424.418.000	254.650.800	169.767.200
33.21.10.2010		10 Pecuk	381.442.000	228.865.200	152.576.800
33.21.10.2011		11 Tanggul	347.131.000	208.278.600	138.852.400
33.21.10.2012		12 Bakung	382.530.000	229.518.000	153.012.000
33.21.10.2013		13 Bermi	338.876.000	203.325.600	135.550.400
33.21.10.2014		14 Mijen	340.851.000	204.510.600	136.340.400
33.21.10.2015		15 Gempolsongo	289.698.000	173.818.800	115.879.200
33.21.11	Demak		5.302.247.000	3.181.348.200	2.120.898.800
33.21.11.2001		1 Bolo	355.215.000	213.129.000	142.086.000
33.21.11.2002		2 Bango	435.688.000	261.412.800	174.275.200
33.21.11.2003		3 Kedondong	359.883.000	215.929.800	143.953.200
33.21.11.2004		4 Sedo	354.088.000	212.452.800	141.635.200
33.21.11.2005		5 Mulyorejo	427.128.000	256.276.800	170.851.200
33.21.11.2006		6 Turirejo	532.923.000	319.753.800	213.169.200
33.21.11.2007		7 Raji	403.770.000	242.262.000	161.508.000
33.21.11.2008		8 Cabean	412.106.000	247.263.600	164.842.400
33.21.11.2009		9 Tempuran	389.966.000	233.979.600	155.986.400
33.21.11.2010		10 Karangmlati	434.729.000	260.837.400	173.891.600
33.21.11.2011		11 Katonsari	350.165.000	210.099.000	140.066.000
33.21.11.2012		12 Kalikondang	442.038.000	265.222.800	176.815.200
33.21.11.2013		13 Donorojo	404.548.000	242.728.800	161.819.200
33.21.12	Bonang		9.586.819.000	5.752.091.400	3.834.727.600
33.21.12.2001		1 Jatimulyo	400.843.000	240.505.800	160.337.200
33.21.12.2002		2 Krajanbogo	441.274.000	264.764.400	176.509.600
33.21.12.2003		3 Sukodono	433.558.000	260.134.800	173.423.200
33.21.12.2004		4 Sumberejo	673.113.000	403.867.800	269.245.200
33.21.12.2005		5 Kembangan	438.624.000	263.174.400	175.449.600
33.21.12.2006		6 Karangrejo	538.071.000	322.842.600	215.228.400
33.21.12.2007		7 Gebangarum	438.051.000	262.830.600	175.220.400
33.21.12.2008		8 Gebang	480.997.000	288.598.200	192.398.800
33.21.12.2009		9 Margolinduk	314.943.000	188.965.800	125.977.200
33.21.12.2010		10 Morodemak	435.857.000	261.514.200	174.342.800
33.21.12.2011		11 Purworejo	607.657.000	364.594.200	243.062.800
33.21.12.2012		12 Betahwalang	407.958.000	244.774.800	163.183.200
33.21.12.2013		13 Serangan	333.207.000	199.924.200	133.282.800
33.21.12.2014		14 Tridonorejo	466.581.000	279.948.600	186.632.400
33.21.12.2015		15 Tlogoboyo	398.296.000	238.977.600	159.318.400
33.21.12.2016		16 Jatirogo	420.660.000	252.396.000	168.264.000
33.21.12.2017		17 Bonangrejo	394.302.000	236.581.200	157.720.800
33.21.12.2018		18 Poncoharjo	545.124.000	327.074.400	218.049.600
33.21.12.2019		19 Wonosari	399.024.000	239.414.400	159.609.600
33.21.12.2020		20 Jali	427.501.000	256.500.600	171.000.400
33.21.12.2021		21 Weding	591.178.000	354.706.800	236.471.200
33.21.13	Wedung		7.773.066.000	4.663.839.600	3.109.226.400
33.21.13.2001		1 Wedung	547.251.000	328.350.600	218.900.400
33.21.13.2002		2 Ngawen	304.944.000	182.966.400	121.977.600
33.21.13.2003		3 Ruwit	415.793.000	249.475.800	166.317.200
33.21.13.2004		4 Kenduren	443.086.000	265.851.600	177.234.400
33.21.13.2005		5 Buko	369.636.000	221.781.600	147.854.400
33.21.13.2006		6 Mandung	291.756.000	175.053.600	116.702.400
33.21.13.2007		7 Berahan Kulon	334.124.000	200.474.400	133.649.600

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	2	3	4	5	6
33.21.13.2008		8 Berahan Wetan	523.738.000	314.242.800	209.495.200
33.21.13.2009		9 Bungo	410.533.000	246.319.800	164.213.200
33.21.13.2010		10 Tempel	360.445.000	216.267.000	144.178.000
33.21.13.2011		11 Jetak	344.793.000	206.875.800	137.917.200
33.21.13.2012		12 Jungsemi	392.940.000	235.764.000	157.176.000
33.21.13.2013		13 Jungpasir	359.967.000	215.980.200	143.986.800
33.21.13.2014		14 Mutihwetan	285.895.000	171.537.000	114.358.000
33.21.13.2015		15 Babalan	434.307.000	260.584.200	173.722.800
33.21.13.2016		16 Mutihkulon	434.985.000	260.991.000	173.994.000
33.21.13.2017		17 Tedunan	407.005.000	244.203.000	162.802.000
33.21.13.2018		18 Kendalasesem	318.811.000	191.286.600	127.524.400
33.21.13.2019		19 Kedungmutih	392.654.000	235.592.400	157.061.600
33.21.13.2020		20 Kedungkarang	400.403.000	240.241.800	160.161.200
33.21.14	Kebonagung		4.950.915.000	2.970.549.000	1.980.366.000
33.21.14.2001		1 Pilangwetan	307.000.000	184.200.000	122.800.000
33.21.14.2002		2 Kebonagug	468.531.000	281.118.600	187.412.400
33.21.14.2003		3 Klampok Lor	275.257.000	165.154.200	110.102.800
33.21.14.2004		4 Mijen	321.543.000	192.925.800	128.617.200
33.21.14.2005		5 Werdoyo	388.337.000	233.002.200	155.334.800
33.21.14.2006		6 Mangunrejo	423.294.000	253.976.400	169.317.600
33.21.14.2007		7 Babat	360.773.000	216.463.800	144.309.200
33.21.14.2008		8 Mangunanlor	324.518.000	194.710.800	129.807.200
33.21.14.2009		9 Tlogosih	379.262.000	227.557.200	151.704.800
33.21.14.2010		10 Prigi	322.894.000	193.736.400	129.157.600
33.21.14.2011		11 Sarimulyo	355.631.000	213.378.600	142.252.400
33.21.14.2012		12 Solowire	331.483.000	198.889.800	132.593.200
33.21.14.2013		13 Sokokidul	297.155.000	178.293.000	118.862.000
33.21.14.2014		14 Megonten	395.237.000	237.142.200	158.094.800
JUMLAH			97.750.000.000	58.650.000.000	39.100.000.000

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR